

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010.07.07	Program Bina Otonomi Daerah		89.403.286.000		89.403.286.000
01	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Kinerja Program : 01.01 Jumlah provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD 01.02 Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah dan penataan daerah otonom baru 01.03 Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah 01.04 Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016 01.05 Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah				
1258	Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga		5.742.914.000		5.742.914.000
01	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah daerah yang depetakan dan diidentifikasi masalah serta dukungan yang diberikan untuk pilkada tahun 2020				
02	Jumlah Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD yang disusun				
03	Jumlah provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD				
04	Persentase pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II				
1258.001	Layanan Administrasi dan dukungan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah daerah yang depetakan dan diidentifikasi masalah serta dukungan yang diberikan untuk pilkada tahun 2020	1 layanan	800.000.000	0	800.000.000
1258.002	provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD	34 Provinsi	3.306.000.000	0	3.306.000.000
1258.003	Peraturan/kebijakan bidang pejabat negara di daerah dan DPRD <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah peraturan/kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD yang disusun	1	740.000.000	0	740.000.000
1258.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker <i>Indikator output :</i> 01 Pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II	1 Layanan	896.914.000	0	896.914.000
1259	Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD		8.494.601.000		8.494.601.000
01	Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Otonom Baru				
02	Jumlah daerah otonomi khusus/istimewa yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/istimewa				
03	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun terkait penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD				
04	Persentase Jumlah Dokumen rencana atau usulan Pembentukan DOB yang dievaluasi dan diverifikasi.				
05	Jumlah Rekomendasi Kebijakan DPOD yang disusun				
06	Asistensi Penyusunan Perdasi dan Perdatus				
07	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II				
1259.001	Layanan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru <i>Indikator output :</i> 01 Presentase peningkatan kinerja pemerintahan Daerah Otonom Baru	1 Layanan	2.304.000.000	0	2.304.000.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1259.002	02 persentase Jumlah Dokumen rencana atau usulan Pembentukan DOB yang dievaluasi dan diverifikasi. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi khusus atau istimewa Indikator output : 01 Jumlah daerah otonomi khusus/istimewa yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/istimewa	3 Provinsi	1.037.616.000	0	1.037.616.000
1259.003	Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah otonom, otonomi khusus/istimewa dan DPOD Indikator output : 01 Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun terkait penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD 02 Jumlah Rekomendasi Kebijakan DPOD yang disusun	5	1.712.562.000	0	1.712.562.000
1259.004	Supervisi dan asistensi percepatan penyelesaian perdasi dan perdassus Indikator output : 01 Asistensi Penyusunan Perdasi dan Perdassus di Papua dan Papua Barat	4	2.550.000.000	0	2.550.000.000
1259.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker Indikator output : 01 Pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II	1 Layanan	890.423.000	0	890.423.000
1261	Evaluasi Kinerja Daerah Dan Peningkatan Kapasitas		8.529.910.000		8.529.910.000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> 01 Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 2018 dari total jumlah provinsi (85%) 02 Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 2018 dari total jumlah kota dan kabupaten (70%) 03 Presentase Jumlah Daerah Kabupaten/Kota berkinerja sedang dan rendah yang ditingkatkan kapasitasnya 04 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II 05 Penyusunan serta tindak lanjut pedoman/kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasita Daerah				
1261.001	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Indikator output : 01 Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 2018 dari total jumlah provinsi (85%) 02 Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 2018 dari total jumlah kota dan kabupaten (70%)	542	5.140.210.000	0	5.140.210.000
1261.002	Layanan Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemerintahan Daerah Indikator output : 01 Presentase Jumlah Daerah Kabupaten/Kota berkinerja sedang dan rendah yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Layanan	1.480.000.000	0	1.480.000.000
1261.003	peraturan/kebijakan bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah Indikator output : 01 Penyusunan serta tindak lanjut pedoman/kebijakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daerah	3	959.700.000	0	959.700.000
1261.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker Indikator output : 01 Pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II	1 Layanan	950.000.000	0	950.000.000
1264	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah		6.763.043.000		6.763.043.000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u> 01 Jumlah daerah yang melaksanakan supervisi regulasi terkait netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019 02 Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disusun terkait kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03	Jumlah Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah				
04	Prosentase Layanan Pengelolaan mutasi dan Administrasi Aparatur Sipil Negara di Daerah Lintas Provinsi dan ke Pusat				
05	Persentase pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II				
1264.002	Kebijakan/regulasi terkait kelembagaan dan kepegawaian <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disusun terkait kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	2	986.155.000	0	986.155.000
1264.003	Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang di bina dalam pengelolaan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah	34 Provinsi	2.826.888.000	0	2.826.888.000
1264.004	Netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019 <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah daerah yang melaksanakan supervisi regulasi terkait netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019	34 provinsi	2.000.000.000	0	2.000.000.000
1264.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker <i>Indikator output :</i> 01 Pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II	1 Layanan	950.000.000	0	950.000.000
1265	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah		53.653.498.000		53.653.498.000
Indikator Kinerja Kegiatan :					
01	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun				
02	Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)				
03	Prosentase tepat waktu Pelaksanaan Pengembangan SDM dan Penyelesaian Urusan Kepegawaian				
04	Prosentase Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Otonomi Daerah				
05	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu				
06	Prosentase penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan				
07	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				
08	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
1265.901	Perencanaan [SBKU] <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun	2 Laporan	79.674.000	0	79.674.000
1265.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I <i>Indikator output :</i> 01 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun 02 Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 03 Prosentase tepat waktu Pelaksanaan Pengembangan SDM dan Penyelesaian Urusan Kepegawaian 04 Prosentase penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	1 Layanan	11.895.424.000	0	11.895.424.000
1265.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal <i>Indikator output :</i> 01 Prosentase Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Otonomi Daerah 02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit 03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1 Layanan	1.200.000.000	0	1.200.000.000
1265.994	Layanan Perkantoran <i>Indikator output :</i> 01 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	1 Layanan	40.478.400.000	0	40.478.400.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3991	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah		6.219.320.000		6.219.320.000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan :</u>				
01	Persentase Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah				
02	Jumlah daerah yang dilaksanakan sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi dalam penyusunan produk hukum daerah				
03	Jumlah daerah yang melaksanakan peninjauan perda/perkada yang mendukung kemudahan investasi				
04	Persentase Jumlah daerah yang melaksanakan peninjauan ranperda/ranperkada yang mendukung kemudahan investasi				
05	Persentase pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II				
3991.002	Asistensi dan supervisi rancangan perda dan perkada <i>Indikator output :</i>	34 Provinsi	1.298.320.000	0	1.298.320.000
	01 Persentase Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah				
3991.004	Provinsi yang diinventarisasi dan direviu materi muatan perda/perkada yang mendukung kemudahan investasi <i>Indikator output :</i>	34 provinsi	1.500.000.000	0	1.500.000.000
	01 Jumlah daerah yang melaksanakan peninjauan perda/perkada yang mendukung kemudahan investasi				
3991.005	Provinsi yang di asistensi dan disupervisi penyusunan materi ranperda/ranperkada yang mendukung kemudahan investasi <i>Indikator output :</i>	34 Provinsi	2.500.000.000	0	2.500.000.000
	01 Persentase jumlah daerah yang melaksanakan peninjauan ranperda/ranperkada yang mendukung kemudahan investasi				
3991.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker <i>Indikator output :</i>	1 Layanan	921.000.000	0	921.000.000
	01 Pelayanan administrasi dan tugas lainnya unit kerja eselon II				

Jakarta, 16 Agustus 2019
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DITJEN

Drs. Akmal Malik, M.Si
NIP. 197003161991011001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/CP	KP/KD/DK/TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010.07.07	Program Bina Otonomi Daerah				89.403.286.000		
01	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia						
	Indikator Kinerja Program :						
01.01	Jumlah provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD						
01.02	Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah dan penataan daerah otonom baru						
01.03	Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah						
01.04	Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016						
01.05	Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah						
1258	Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga (Fungsi/Subfungsi : 01.01)		5.742.914.000		5.742.914.000		
1258.001	Layanan Administrasi dan dukungan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Base Line]	1 layanan	800.000.000		800.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		800.000.000		800.000.000		
053	Penyusunan dan Pembahasan Instrumen		200.000.000		200.000.000		
054	Kunjungan lapangan dalam rangka pemetaan dan identifikasi masalah		200.000.000		200.000.000		
055	pembahasan hasil kunjungan lapangan		400.000.000		400.000.000		
1258.002	provinsi yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD [Base Line]	34 Provinsi	3.306.000.000		3.306.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		3.306.000.000		3.306.000.000		
051	Asistensi dan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1.435.000.000		1.435.000.000		
052	Asistensi dalam pelaksanaan LKPJ Provinsi dan Asosiasi pemerintahan Daerah		395.000.000		395.000.000		
053	Penilaian kinerja DPRD Provinsi		891.000.000		891.000.000		
054	Koordinasi dan konsultasi pengesahan/penetapan pengangkatan dan pemberhantian KDH/WKDH dan DPRD		585.000.000		585.000.000		
1258.003	Peraturan/kebijakan bidang pejabat negara di daerah dan DPRD [Base Line]	1 Peraturan/Kebijakan	740.000.000		740.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		740.000.000		740.000.000		
051	penyusunan dan pembahasan inventarisasi permasalahan		95.315.000		95.315.000		
052	penyusunan dan pembahasan draft rancangan peraturan/kebijakan		155.105.000		155.105.000		
053	pembahasan rancangan peraturan/kebijakan		489.580.000		489.580.000		
1258.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1 Layanan	896.914.000		896.914.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		896.914.000		896.914.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		896.914.000		896.914.000		
1259	Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD (Fungsi/Subfungsi : 01.06)		8.494.601.000		8.494.601.000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1259.001	Layanan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1 Layanan	2.304.000.000		2.304.000.000		KP
051	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Pembentukan Tahun 2012-2014		922.000.000		922.000.000		
052	Asistensi dan supervisi Peningkatan Kinerja Pemerintahan DOB		1.000.190.000		1.000.190.000		
053	Evaluasi Dan Verifikasi Rencana/Usulan Pembentukan Daerah persiapan Otonomi Baru		381.810.000		381.810.000		
1259.002	peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi khusus atau istimewa [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA	3 Provinsi	1.037.616.000		1.037.616.000		KP
051	Asistensi dan supervisi Implementasi Pelaksanaan Otsus Aceh		453.596.000		453.596.000		
052	Asistensi dan supervisi Implementasi Pelaksanaan Otsus Provinsi DKI Jakarta		193.237.000		193.237.000		
053	Asistensi dan supervisi Implementasi Pelaksanaan keistimewaan provinsi D.I.Y		390.783.000		390.783.000		
1259.003	Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah otonom, otonomi khusus/istimewa dan DPOD [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT	5 Peraturan/Ke bijakan	1.712.562.000		1.712.562.000		KP
1259.003.001	Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah, otsus/istimewa, dan DPOD JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1 Peraturan/Kebij akan	238.304.000		238.304.000		
051	Penyusunan Draft rancangan Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah, otsus/istimewa, dan DPOD		48.447.000		48.447.000		
052	Pembahasan rancangan Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah, otsus/istimewa, dan DPOD		55.632.000		55.632.000		
053	Finalisasi rancangan Kebijakan/Peraturan bidang penataan daerah, otsus/istimewa, dan DPOD		134.225.000		134.225.000		
1259.003.002	Rekomendasi DPOD JUMLAH KOMPONEN UTAMA	4 Peraturan/Kebij akan	1.474.258.000		1.474.258.000		
051	Koordinasi DPOD bidang keuangan		75.000.000		75.000.000		
052	Koordinasi DPOD bidang pemerintahan		75.000.000		75.000.000		
053	Asistensi kebijakan DPOD bidang pemerintahan dan keuangan		495.998.000		495.998.000		
054	- Penyusunan Rekomendasi DPOD Bidang keuangan		401.580.000		401.580.000		
055	Penyusunan Rekomendasi DPOD Bidang Pemerintahan		426.680.000		426.680.000		
1259.004	Supervisi dan asistensi percepatan penyelesaian perdasi dan perdasus [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT JUMLAH KOMPONEN UTAMA	4 Perdasi/Perd asus	2.550.000.000		2.550.000.000		KP
051	Supervisi dan asistensi percepatan penyelesaian penyusunan perdasi dan perdasus di Papua		1.150.000.000		1.150.000.000		
052	Supervisi dan asistensi percepatan penyelesaian penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Barat		1.100.000.000		1.100.000.000		
053	Koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian perdasi dan perdasus		300.000.000		300.000.000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1259.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1 Layanan	890.423.000		890.423.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		890.423.000		890.423.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		890.423.000		890.423.000		
1261	Evaluasi Kinerja Daerah Dan Peningkatan Kapasitas (Fungsi/Subfungsi : 01.03)		8.529.910.000		8.529.910.000		
1261.001	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota [Base Line]	542 provinsi/kabupaten/kota	5.140.210.000		5.140.210.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		5.140.210.000		5.140.210.000		
052	Pembahasan Hasil Entry Data LPPD		2.070.000		2.070.000		
054	Bintek pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota		609.230.000		609.230.000		
055	Bintek tatacara pengukuran kinerja pemerintahan daerah bagi Timnas		175.000.000		175.000.000		
056	Bintek tatacara pengukuran kinerja pemerintahan daerah bagi Timda		277.820.000		277.820.000		
057	Klarifikasi dan validasi hasil EKPPD Provinsi/Kabupaten/Kota		1.647.546.000		1.647.546.000		
058	Kunjungan lapangan dalam rangka EKPPD Provinsi		636.564.000		636.564.000		
059	Sidang Tim nasional EKPPD		2.070.000		2.070.000		
060	Penyusunan laporan hasil evaluasi (LHE) Nasional		180.000.000		180.000.000		
061	Penyusunan laporan hasil evaluasi (LHE) Individu		175.000.000		175.000.000		
063	Apresiasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		934.910.000		934.910.000		
064	Implementasi dan memasyarakatkan Otonomi Daerah		500.000.000		500.000.000		
1261.002	Layanan Peningkatan Kapasitas Kinerja Pemerintahan Daerah [Base Line]	2 Layanan	1.480.000.000		1.480.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		1.480.000.000		1.480.000.000		
051	Pemetaan Kapasitas Pemerintah Daerah yang Berkinerja Rendah dan Sedang		225.000.000		225.000.000		
052	Bintek peningkatan kapasitas pemerintah daerah		435.000.000		435.000.000		
053	Tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		820.000.000		820.000.000		
1261.003	peraturan/kebijakan bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah [Base Line]	3 pedoman/kebijakan	959.700.000		959.700.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
1261.003.001	Manual Pedoman Penyusunan LPPD	1 pedoman/kebijakan	130.000.000		130.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		130.000.000		130.000.000		
051	Pembahasan penyusunan Manual Pedoman Penyusunan LPPD		130.000.000		130.000.000		
1261.003.002	Manual Tata Cara Pelaksanaan EKPPD	1 pedoman/kebijakan	129.700.000		129.700.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		129.700.000		129.700.000		
051	Pembahasan Manual Tata Cara Pelaksanaan EKPPD		129.700.000		129.700.000		
1261.003.003	Pedoman/kebijakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas daerah	1 pedoman/kebijakan	700.000.000		700.000.000		

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		700.000.000		700.000.000		
051	Penyusunan dan pembahasan		185.000.000		185.000.000		
052	Sosialisasi pedoman/kebijakan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah		515.000.000		515.000.000		
1261.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1 Layanan	950.000.000		950.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		950.000.000		950.000.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		950.000.000		950.000.000		
1264	Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Fungsi/Subfungsi : 01.03)		6.763.043.000		6.763.043.000		
1264.002	Kebijakan/regulasi terkait kelembagaan dan kepegawaian [Base Line]	2 Peraturan/Ke bijakan	986.155.000		986.155.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		986.155.000		986.155.000		
051	Penyusunan peraturan/kebijakan terkait kelembagaan dan kepegawaian daerah		400.000.000		400.000.000		
052	Sosialisasi peraturan/kebijakan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah		586.155.000		586.155.000		
1264.003	Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang di bina dalam pengelolaan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah [Base Line]	34 Provinsi	2.826.888.000		2.826.888.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		2.826.888.000		2.826.888.000		
051	Pengelolaan sistem informasi profil kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah		381.000.000		381.000.000		
052	asistensi dan supervisi pengelolaan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah		1.533.910.000		1.533.910.000		
054	Asistensi dan supervisi Pelayanan administrasi mutasi ASN daerah		406.000.000		406.000.000		
055	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah		505.978.000		505.978.000		
1264.004	Netralitas ASN di daerah dalam rangka pemilu 2019 [Base Line]	34 provinsi	2.000.000.000		2.000.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		2.000.000.000		2.000.000.000		
051	Diseminasi/ Sosialisasi arah kebijakan terkait netralitas ASN		404.000.000		404.000.000		
052	Asistensi dan supervisi dalam rangka Pengendalian dan Pemecahan Masalah Kelembagaan dan Kepegawaian, kasus pelanggaran netralitas ASN		1.096.000.000		1.096.000.000		
053	Evaluasi dan Konsolidasi Kebijakan Netralitas ASN		500.000.000		500.000.000		
1264.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1 Layanan	950.000.000		950.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		950.000.000		950.000.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		950.000.000		950.000.000		
1265	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah (Fungsi/Subfungsi : 01.03)		53.653.498.000		53.653.498.000		
1265.901	Perencanaan [SBKU] [Base Line]	2 Laporan	79.674.000		79.674.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1265.901.U01	DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SATKER ESELON 1 TANPA SATKER VERTIKAL	1 Laporan	59.660.000		59.660.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		59.660.000		59.660.000		
051	Persiapan		5.400.000		5.400.000		
052	Pelaksanaan		50.260.000		50.260.000		
053	Pelaporan		4.000.000		4.000.000		
1265.901.U10	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1 Laporan	20.014.000		20.014.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		20.014.000		20.014.000		
051	Persiapan		2.970.000		2.970.000		
052	Pelaksanaan		16.044.000		16.044.000		
053	Pelaporan		1.000.000		1.000.000		
1265.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	1 Layanan	11.895.424.000		11.895.424.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		11.895.424.000		11.895.424.000		
051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		381.851.000		381.851.000		
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		1.063.973.000		1.063.973.000		
053	Pengelolaan data dan informasi		3.500.000.000		3.500.000.000		
054	Pengelolaan keuangan		1.316.075.000		1.316.075.000		
055	Pengelolaan perbendaharaan		482.525.000		482.525.000		
056	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		2.112.000.000		2.112.000.000		
057	Pengelolaan kepegawaian		910.284.000		910.284.000		
058	Pelayanan umum dan perlengkapan		1.078.716.000		1.078.716.000		
061	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		1.050.000.000		1.050.000.000		
1265.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1 Layanan	1.200.000.000		1.200.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		1.200.000.000		1.200.000.000		
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		560.000.000		560.000.000		
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		640.000.000		640.000.000		
1265.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1 Layanan	40.478.400.000		40.478.400.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		40.478.400.000		40.478.400.000		
001	Gaji dan Tunjangan		33.984.885.000		33.984.885.000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.493.515.000		6.493.515.000		
3991	Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah (Fungsi/Subfungsi : 01.01)		6.219.320.000		6.219.320.000		
3991.002	Asistensi dan supervisi rancangan perda dan perkara [Base Line]	34 Provinsi	1.298.320.000		1.298.320.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		1.298.320.000		1.298.320.000		
051	Asistensi dan supervisi penyusunan rancangan perda dan perkara		654.000.000		654.000.000		
052	Monitoring dan evaluasi penyusunan rancangan perda dan perkara		455.370.000		455.370.000		
053	Koordinasi dan konsultasi data dan informasi kebijakan daerah		188.950.000		188.950.000		
3991.004	Provinsi yang diinventarisasi dan direviu materi muatan perda/perkada yang mendukung kemudahan investasi [Base Line]	34 provinsi	1.500.000.000		1.500.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		1.500.000.000		1.500.000.000		

KENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (07) Ditjen Otonomi Daerah
PROGRAM : (010.07.07) PROGRAM BINA OTONOMI DAERAH
SATUAN KERJA : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (51) KOTA JAKARTA PUSAT

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
051	inventarisasi perda yang mendukung kemudahan investasi		500.000.000		500.000.000		
052	reviu materi perda yang mendukung kemudahan investasi		1.000.000.000		1.000.000.000		
3991.005	<i>Provinsi yang di asistensi dan disupervisi penyusunan materi ranperda/ranperkada yang mendukung kemudahan investasi [Base Line]</i>	34 Provinsi	2.500.000.000		2.500.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		2.500.000.000		2.500.000.000		
051	asistensi dan supervisi penyusunan rancangan perda dan perkada yang mendukung kemudahan investasi		1.000.000.000		1.000.000.000		
052	monitoring dan evaluasi penyusunan rancangan perda dan perkada yang mendukung kemudahan investasi		750.000.000		750.000.000		
053	Pengelolaan data informasi kebijakan daerah yang mendukung kemudahan investasi		750.000.000		750.000.000		
3991.970	<i>Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]</i>	1 Layanan	921.000.000		921.000.000		KP
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		921.000.000		921.000.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		921.000.000		921.000.000		

TOTAL	2019	2018
RM	89.403.286.000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
	89.403.286.000	

Jakarta, 16 Agustus 2019
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DITJEN


Drs. Akmal Malik, M.Si
NIP. 197003161991011001